

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian (*research design*) merupakan proses *framework* dari suatu penelitian ilmiah. Desain penelitian yang baik akan menentukan keberhasilan serta kualitas dari suatu penelitian ilmiah. Dengan menyusun desain penelitian, peneliti pada dasarnya akan membuat rancangan bagaimana yang akan dilakukan dalam upaya dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Desain penelitian mencerminkan standar mutu yang hendak diraih oleh peneliti (Efferin & Darmadji, 2008). Pada dasarnya, desain penelitian merupakan rincian dari penelitian yang akan dilakukan peneliti, mencakup bagaimana data yang akan dikumpulkan, dari mana data diperoleh, alat apa yang akan digunakan, dan bagaimana analisis data untuk menjawab permasalahan yang diajukan (Suryadi, Kusnendi, & Mulyadi, 2020).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2012). Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengakajian fenomena secara lebih rinci atau membedakan dengan fenomena yang lain (Surdiyo, 2022). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau menggambarkan situasi atau kejadian (Sudaryana & Agusiady, 2022). Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data numerik (angka) untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif cenderung lebih objektif dan berfokus pada generalisasi dari sampel yang dianalisis, sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas (Rachmawati & Susano, 2024). Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai

karakteristik tertentu dalam kehidupan yang dinamakan sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikatnya hubungan diantara variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif (Sujarweni, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif atau disebut dengan metode deskriptif kuantitatif. Metode tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk mengamati secara sistematis fakta-fakta dengan analisis numerik (angka) guna menggambarkan kinerja keuangan Provinsi Se – Kalimantan yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan daerah, seperti rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas pendapatan, rasio aktivitas (keserasian), dan rasio pertumbuhan pendapatan.

## **B. Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono (2012) variabel penelitian merupakan suatu atribusi atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang akan dianalisis pada penelitian ini hanya satu variabel atau disebut dengan analisis data univariat (Hermawan, 2005). Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi variabel yang diteliti. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam mewujudkan *good governance* pada suatu pemerintahan. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah yaitu menggunakan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas pendapatan, rasio aktivitas (keserasian), dan rasio pertumbuhan pendapatan. Operasional variabel pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Rasio Keuangan Daerah	Kemandirian Daerah : $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\%$ (Mahmudi, 2021)	Rasio
	Ketergantungan Daerah : $\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$ (Mahmudi, 2021)	Rasio
	Efektivitas Pendapatan : $\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$ (Mahmudi, 2021)	Rasio
	Aktivitas (Keserasian) : Rasio Belanja Rutin = $\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$ Rasio Belanja Modal = $\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$ (Halim. Dr. A, 2004)	Rasio
	Pertumbuhan Pendapatan : $\frac{(\text{Pendapata Tahun Berjalan} - \text{Pendapatan Tahun}^{-1})}{\text{Pendapatan Tahun}^{-1}} \times 100\%$ (Mahmudi, 2021)	Rasio

### C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan di teliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Martono. N, 2010).

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pemerintah provinsi yang ada di Kalimantan populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 pemerintah daerah provinsi. Berikut data pemerintah provinsi yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

**Tabel 3.2 Populasi Penelitian**

No	Pemerintah Provinsi di Pulau Kalimantan
1.	Kalimantan Barat
2.	Kalimantan Tengah
3.	Kalimantan Selatan
4.	Kalimantan Timur
5.	Kalimantan Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik

## 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* atau disebut sebagai metode sampel tidak acak. Teknik sampel tidak acak merupakan teknik pengambilan sampel yang dimana elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel (Kurcoro, H, 2018). Sedangkan metode yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu metode sampel jenuh yang disebut sebagai metode penentu sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai sampel atau metode ini sring disebut sebagai sensus (Martono. N, 2010). Maka teknik pengambilan data sampel dengan teknik *nonprobability sampling* dengan sampel penelitian berjumlah 5 Provinsi selama 6 Tahun penelitian mulai dari tahun 2019-2024.

## D. Studi Kasus

Pada penelitian ini, melakukan analisis komparasi antar Provinsi di Kalimantan. Kalimantan memiliki 5 provinsi yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini meneliti mengenai kinerja keuangan antar Provinsi di Kalimantan yang berdasarkan fenomena bahwa pulau Kalimantan menjadi satu-satunya pulau yang mengalami penurunan pada tingkat kemandirian diantara pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua dalam 3 tahun berturut-turut pada tahun 2022-2024.

Semestara itu, pada penelitian ini kinerja keuangan antar Provinsi di Kalimantan akan diukur menggunakan rasio-rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas

pendapatan, rasio aktivitas (keserasian), dan rasio pertumbuhan pendapatan. Hal tersebut akan dapat membantu dalam menganalisis secara komparatif kinerja keuangan dari masing-masing Provinsi di Kalimantan dengan data yang dibutuhkan yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 – 2024.

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian merupakan asal muasal data diperoleh. Keberadaan sumber data menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Sumber data mengacu pada topik penelitian yang terkait dengan data tersebut baik objek, gerakan, orang, dan lokasi yang terkait dapat menjadi sumber data. Kekayaan data yang dikumpulkan akan dipengaruhi oleh keakuratan sumber data yang dipilih dan ditentukan (Priyono & Chandra, 2023). Jenis dan sumber data dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya yaitu data primer dan data sekunder (Sujarweni, 2020). Sumber data pada penelitian ini yaitu bersumber dari website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui tautan <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

Sehingga data dalam penelitian ini merupakan data sekunder (*secondary data*) yaitu jenis data yang diperoleh melalui sumber-sumber resmi lainnya seperti instansi-instansi pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan peneliti bukanlah orang pertama yang mengumpulkan data tersebut (Seran, 2020).

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian (Sujarweni, 2020). Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Ismayani, 2019). Tujuan untuk mengetahui data tentu harus menggunakan metode yang efisien dan akurat (Sudaryana & Agusdiady, 2022). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumenter merupakan metode pengumpulan data dengan membaca dokumen pada instansi atau lembaga (Sarmanu, 2017). Teknik

dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang terekam dalam bentuk catatan tertulis atau gambar, seperti data riwayat kesehatan pasien, kinerja perusahaan, catatan hasil belajar siswa, dan sebagainya (Suryadi, Kusnendi & Mulyadi, 2020).

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber data berupa Laporan Realisasi Anggaran dari setiap Provinsi di Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, serta Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2019 – 2024.

### **G. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian (Isamayanti, 2019). Data yang telah dikumpulkan melalui Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah setiap Provinsi di Kalimantan Tahun 2019-2024, dilakukan analisis data untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2012). Analisis deskriptif digambarkan sebagai metode untuk menganalisis sebuah persoalan sosial secara mandiri tanpa menghubungkan atau mengaitkan dengan persoalan sosial lainnya (Seran, 2020). Analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran pada variabel yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas pendapatan, rasio aktivitas (keserasian), dan rasio pertumbuhan pendapatan.. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang berasal dari website Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan melalui tautan <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.
2. Mentabulasikan data yang telah dikumpulkan untuk dianalisis.

**Tabel 3.3 Tabulasi Data**

No	Provinsi	Tahun Anggaran					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kalimantan Barat						
2.	Kalimantan Selatan						
3.	Kalimantan Tengah						
4.	Kalimantan Timur						
5.	Kalimantan Utara						

3. Menganalisis data dari hasil yang telah dihitung menggunakan rasio-rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas pendapatan, rasio aktivitas (keserasian), dan rasio pertumbuhan pendapatan dengan berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan.
4. Mendeskripsikan hasil data analisis mengenai gambaran kinerja keuangan dari setiap Provinsi se - Kalimantan menggunakan kriteria dari aspek pengukuran berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut :

**a. Kemandirian Daerah**

Kriteria dari tingkat kemandirian daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4 Kriteria Pengukuran Tingkat Kemandirian Daerah**

Persentase (%)	Kriteria	Pola Hubungan
> 75%	Sangat Mandiri	Delegatif
50% - 75%	Mandiri	Partisipatif
25% - 50%	Sedang	Konsultatif
< 25%	Rendah	Intruktif

Sumber : Mahmudi (2021)

Pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa dengan nilai persentase lebih dari 75% dan nilai persentase 50% - 75% menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah termasuk pada kriteria yang tinggi dan pola hubungan yang delegatif atau menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai daerahnya sendiri dengan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Nilai persentase 25% - 50% menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah termasuk pada kriteria sedang dan memiliki pola hubungan yang partisipatif atau menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai mampu membiayai daerahnya sendiri melalui pendapatan asli daerah namun masih memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemudian nilai persentase 25% - 10% dengan pola hubungan konsultatif dan nilai persentase kurang dari 10% dengan pola hubungan intruktif termasuk pada tingkat kemandirian daerah yang rendah atau menunjukkan pemerintah daerah belum mampu membiayai daerahnya sendiri melalui pendapatan asli daerah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

#### b. Ketergantungan Daerah

Kriteria dari tingkat ketergantungan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5 Kriteria Pengukuran Tingkat Ketergantungan Daerah**

Persentase (%)	Kriteria
> 75%	Sangat Tinggi
50% - 75%	Tinggi
25% - 50%	Sedang
< 25%	Rendah

Sumber : Mahmudi (2021)

Pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa dengan nilai persentase lebih dari 75% menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah termasuk pada kriteria sangat tinggi yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Nilai persentase 50% - 75% menunjukkan

bahwa tingkat ketergantungan daerah masih termasuk pada kriteria yang tinggi dan nilai persentase 25% - 50% menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah sudah termasuk pada kriteria sedang atau menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai memiliki pendapatan diluar pendapatan transer yang dapat menunjang perekonomian daerahnya. Kemudian jika dengan nilai persentase kurang dari 25% menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah termasuk pada kriteria rendah yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menunjang perekonomian daerahnya melalui pendapatan daerahnya diluar dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

### c. Efektivitas Pendapatan

Kriteria dari tingkat efektivitas pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.6 Kriteria Pengukuran Tingkat Efektivitas Pendapatan**

Persentase (%)	Kriteria
<50%	Tidak Efektif
50% - 90%	Cukup efektif
90% – 100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber : Mahmudi (2021)

Pada tabel 3.6 menunjukkan bahwa dengan nilai persentase kurang dari 50% menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PAD termasuk pada kriteria tidak efektif yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mencapai target anggarannya masih buruk. Nilai persentase 50% - 90% menunjukkan bahwa tingkat efektivitas termasuk pada kriteria cukup efektif. Kemudian nilai persentase 90% - 100% menunjukkan bahwa tingkat efektivitas termasuk pada kriteria efektif dan nilai persentase lebih dari 100% menunjukkan bahwa tingkat efektivitas termasuk pada kriteria sangat efektif, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam memenuhi target anggaran semakin baik.

#### d. **Aktivitas (Keserasian)**

Kriteria dari tingkat keserasian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7 Kriteria Pengukuran Tingkat Keserasian Daerah**

Persentase (%)	Kriteria
( + ) Belanja Rutin	( - ) Belanja Modal

Sumber : Halim. Dr. A (2004)

Pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa dengan nilai persentase belanja rutin yang semakin tinggi maka nilai persentase belanja modal cenderung akan semakin kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan lebih besar digunakan untuk kebutuhan operasional dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan atau menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Tidak ada patokan pasti dalam besarnya rasio belanja rutin dan belanja modal terhadap APBD, karena sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun sebagaimana daerah di negara yang berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan daerahnya yang relatif masih kecil dan perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

#### e. **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kriteria dari tingkat pertumbuhan PAD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8 Kriteria Pengukuran Tingkat Pertumbuhan Daerah**

Persentase (%)	Kriteria
( + )	Peningkatan Kinerja
( - )	Penurunan Kinerja

Sumber : Mahmudi (2021)

Pada tabel 3.8 menjelaskan bahwa, dengan nilai persentase yang terus meningkat dari setiap tahunnya menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD memberikan peningkatan kinerja yang lebih baik. Begitupun sebaliknya, jika nilai persentase yang terus menurun dari setiap tahunnya

menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD memberikan penurunan kinerja yang lebih buruk.